

IMPLEMENTASI BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KELURAHAN SUNGAI LANGKAI KECAMATAN SAGULUNG KOTA BATAM 2020

Mona Anggraini¹, Edison², Nazaki³
170565201085@student.umrah.ac.id

Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

One of the government's efforts to improve targeting and encourage financial inclusion in the distribution of social assistance was transformed by the Raskin program into the BPNT Program in 2017. BPNT is assistance from the government that is given to KPM every month through electronic money and banking mechanisms which can then be used to obtain food ingredients in e-Warong. The amount of assistance for the BPNT program is Rp. 200,000/month/KPM. The purpose of this study was to determine the implementation of BPNT in Sungai Langkai Village, Sagulung District, Batam City in 2020. The writer used descriptive qualitative method. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, and documentation. The results in this study are seen from Edward III's theory, namely (1) communication, related to socialization and education to KPM, (2) resources, related to budgetary resources, facility resources, and human resources, (3) disposition, tendencies of BPNT program implementers, (4) bureaucracy, related to SOPs and BPNT implementation mechanisms. In addition, it is also seen from the performance indicators of the 6T BPNT program (exactly) it shows that the Implementation of Non-Cash Food Rocks in the Sungai Langkai village has been running even though it is not optimal, from the 6T indicator there are 2 indicators that are not optimal. Namely indicators of timely and appropriate administration. In addition, it is also seen from the performance indicators of the 6T BPNT program (exactly) it shows that the Implementation of Non-Cash Food Rocks in the Sungai Langkai village has been running even though it is not optimal, from the 6T indicator there are 2 indicators that are not optimal. Namely indicators of timely and appropriate administration. In addition, it is also seen from the performance indicators of the 6T BPNT program (exactly) it shows that the Implementation of Non-Cash Food Rocks in the Sungai Langkai village has been running even though it is not optimal, from the 6T indicator there are 2 indicators that are not optimal. Namely indicators of timely and appropriate administration.

Keywords: Implementation, Non-Cash Food Aid, and Beneficiary Families

I. Pendahuluan

Kemiskinan bukanlah fenomena baru di dalam kehidupan masyarakat. Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang memerlukan penanganan yang sistematis. Menurut Ritongga dalam

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan

² Dosen Ilmu Administrasi Negara

³ Dosen Ilmu Pemerintahan

(Muhtar, 2018) masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan pada bulan Maret 2020 mencapai 9,78 persen atau sekitar 26,42 juta jiwa. Peraturan Presiden No 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Menurut (Supriatna, 1997) menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Tingginya tingkat kemiskinan membuat pemerintah lebih memfokuskan bantuan terhadap pangan. Mengingat pangan merupakan kebutuhan pokok yang bersifat mendasar, sehingga memiliki sifat strategis dalam pembangunan baik tingkat nasional maupun wilayah.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yaitu membuat program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Tunai yang biasa disebut Kartu Keluarga Sehat (KKS). BPNT adalah bantuan dari pemerintah yang di berikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik dan mekanisme perbankan yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh bahan pangan di e-Warong.

Pada tahun 2017 program subsidi Rastra ditransformasikan menjadi BPNT di 44 kota terpilih di Indonesia yang memiliki akses dan fasilitas yang memadai. Pada tahun 2018 menjadi bantuan pangan sosial yang terdiri dari Bansos Rastra dan BPNT. Kemudian pada akhir tahun 2019 program non tunai di terapkan diseluruh Kota/Kabupaten. Perbedaan program BPNT dan Bansos Rastra yaitu BPNT disalurkan melalui uang elektronik setiap bulannya sementara Rastra mendapat 10 kg beras per bulan tanpa pungutan biaya apapun.

Program BPNT bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM), memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan batuan pangan bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dalam memenuhi kebutuhan pangan KPM, serta mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun besaran batuan pangan non tunai adalah Rp.110.000/bulan/KPM kemudian naik menjadi Rp.150.000/bulan/KPM dan kini naik lagi menjadi RP.200.000/bulan/KPM karena wabah virus covid-19. Program ini juga memperbanyak komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur tetapi ada juga sumber protein hewani dan nabati.

Menurut Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan sosial yang diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan meliputi perlindungan sosial, keamanan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar

Program BPNT dilaksanakan salah satunya, di Kota Batam tepatnya di Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung pada tahun 2017. Menurut Badan Pusat Statistik tingkat kemiskinan di Kota Batam pada tahun 2019 mencapai 66,21 ribu jiwa atau 4,85 persen dari jumlah penduduk sekitar 1.321.733 jiwa. Di kota Batam terdapat sebanyak 23.086 KPM total penerima bantuan sosial tunai pada tahun 2020. Sedangkan di kecamatan Sagulung memiliki kuota penerima manfaat sebagai berikut:

Tabel 1. Data penerimaan BPNT di Kecamatan Sagulung

No.	Kelurahan	Jumlah
1.	Sungai Langkai	959
2.	Tembesi	614
3.	Sagulung Kota	635

4.	Pelunggut	1068
5.	Sungai Lekop	929

Di Kota Batam bank yang berkerja sama dengan e-Warong adalah bank BRI. Dalam penyalurannya untuk kota Batam tersedia 112 agen yang melayani pengambilan bantuan yang di tunjuk bank yang ada dibawah nauangan HIMBARA. Bahan pangan yang diterima berupa 10kg beras, 1 kg kacang hijau, 1 papan telur, dan jeruk. Di Kelurahan Sungai Langkai terdapat dua titik pengambilan bantuan yaitu :

Tabel 2. Data Pengambilan BPNT di Kelurahan Sungai Langkai

No.	Nama Agen	Jumlah
1.	Agen BPNT Cemara	499
2.	Agen BPNT Nina	460
Total		959

Untuk di Kota Batam sendiri jumlah penerima bantuan di Kota Batam ada sebanyak 31.000 KK, namuun hanya 23.000 yang terealisasi. Sementara 8.000 data lainnya belum terealisasi atau masih kosong.

Berdasarkan teori Implementasi Kebijakan Edward III untuk mencapai hasil implementasi kebijakan, terdapat empat faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam kebijakan, yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Oleh sebab itu penulisan melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaiman Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut (Muhajir, 1996) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mana lebih mengutamakan pada masalah proses dan makna atau persepsi, dimana penelitian ini diharapkan dapat mengukapkan berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi analisa yang teliti dan penuh makna, yang juga tidak menolak informasi kuantitatif dalam bentuk angka maupun jumlah. Sedangkan menurut (Sugiyono, 2019) pendekatan kualitatif deskriptif adalah cara untuk mengukapkan atau memperoleh informasi dari data penelitian secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Menurut (Hasan, 2002) pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian deskriptif biasanya berupa kata-kata, gambar. Data yang dikumpulkan berdasarkan dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, memo, atau catatan pribadi lainnya. Adapun informan pada penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 3. Informan

No.	Informan	Keterangan
1.	Dinas Sosial	Penanggung jawab pelaksanaan program BPNT
2.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Pendamping dalam pelaksanaan program BPNT
3.	Agen/ E-warong BPNT	Pihak penyalur bantuan program BPNT
4.	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Selaku penerima manfaat bantuan program BPNT

III. Hasil dan Pembahasan

Penelitian yang dilakukan peneliti tentang Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi penyaluran BPNT di Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam. Implementasi dari suatu program akan sangat menentukan keberhasilan program tersebut. Program BPNT sebagai adalah salah satu program yang ditransformasikan untuk memastikan program menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi dengan menggunakan sistem perbankan. Ada beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, berikut merupakan uraian secara sistematis dari beberapa penelitian :

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	(Pramessti et al., 2019) Universitas Maritim Raja Ali Haji	- Penelitian ini menggunakan teori model implementas Van Meter dan Van Horn - menunjukkan implementasi BPNT di tanjungpinang belum optimal karena terdapat saldo kosong	Metode penelitian yang sama yaitu metode Kualitatif
2.	(Pramessti et al., 2019) Universitas Maritim Raja Ali Haji	Penelitian ini menggunakan indikator evaluasi kebijakan yaitu <i>input, proses, output, dan outcom es.</i>	Metode penelitian yang sama yaitu metode Kualitatif
3.	(Hanum, 2019) Universitas Sumantra Utara Medan	Penelitian ini menggunakan teori Sugioyono	Metode penelitian yang sama yaitu metode Kualitatif
4.	Istiharoh (2021) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru	Penelitian ini menggunakan teori pengukuran efektivitas dari Makmur	Metode penelitian yang sama yaitu metode Kualitatif

Implementasi kebijakan merupakan aspek sangat penting dalam membuat kebijakan karena program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai tujuan dan manfaat yang diinginkan. Menurut Edward III implementasi kebijakan suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu dikemukakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari implementasi tersebut. Menurut Edward III untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan dilihat dari empat indikator yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan variabel pertama sangat penting dalam implementasi kebijakan. Komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, peraturan dan ide. Sehingga komunikasi akan

efektif apabila pembuat kebijakan mengerti apa yang dikerjakan dan tujuan program tersampaikan kepada penerima manfaat. Menurut Edward III komunikasi memiliki 3 dimensi yaitu, transformasi informasi, kejelasan dan konsisten.

Program BPNT merupakan program Nasional yang dikelola oleh Kementerian Sosial dan dibantu oleh Dinas sosial dan TKSK dibawah pembinaan Dinas Sosial yang berperan melakukan pendampingan program BPNT tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan. Berdasarkan pedoman Umum BPNT komunikasi dalam program ini yaitu dengan cara sosialisasi dan edukasi. Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pelaksanaan edukasi dan sosialisasi dilakukan setelah registrasi dan pembukaan rekening kemudian diberikan kepada KPM BPNT, pendamping sosial BPNT, pemerintah provinsi dan kota, perangkat kecamatan dan desa, serta e-warong dan agen penyalur.

Program BPNT pertama kali disosialisasikan pada pertengahan tahun 2017. Edukasi dan sosialisasi program sembako merupakan tugas bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, bank penyalur dan tenaga pelaksana Bansos Pangan. Bentuk media dalam mensosialisasikan program BPNT yaitu :

- a. Pertemuan /rapat koordinasi, seminar, lokakarya, dan diskusi
- b. Komunikasi tatap muka atau kelompok misalnya melalui pertemuan
- c. Media cetak
- d. Media elektronik dan media daring

Sosialisasi mengenai Program BPNT pada awal tranformasi sudah dilakukan. Sosialisasi dilakukan oleh dinas sosial sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. Selain dinas sosial, bank Penyalur, agen/ pengelola E-warong, tenaga pelaksana bansos pangan di daerah juga ikut serta agar efektifnya sosialisasi BPNT kepada KPM. Sosialisasi dalam implementasi BPNT ini dilakukan secara berjenjang maka diperlukannya hubungan yang baik dan kerjasama yang baik antar pelaksana guna untuk kerberhasilan program dan tidak terjadi kesalah pahaman antar pelaksana BPNT. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan komunikasi penyaluran program BPNT berkaitan dengan lemahnya sosialisasi program. Seperti yang dinyatakan TSKS kelurahan sungai langkai bahwasannya tokoh masyarakat seperti RT/RW memiliki andil dalam melakukan sosialasi BPNT. Karena yang lebih mengetahui kondisi warganya yaitu RT/RWnya sendiri. Tetapi dilapangan RT/RW

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan dalam implementasi BPNT bahwa sosialisasi sangat berperan penting dalam memberikan pemahaman KPM terhadap BPNT agar tidak adanya kesalahpahaman antara KPM dengan pihak terkait. Namun, dalam implementasinya belum efektif. Sosialisasi telah dilakukan dari tingkat Dinas ke TKSK dan perangkat warga seperti Ketua RT dan Ketua RW. Namun, tidak ada sosialisasi lanjutan yang dilakukan RT/RW kepada KPM terkait BPNT tersebut, oleh karena itu banyak KPM tidak mengetahui adanya keterlibatan RT/RW sebagai pembimbing KPM.

2. Sumberdaya

Untuk mendukung jalannya implementasi kebijakan diperlukan adanya sumber daya dalam melaksanakan kebijakan. Menurut Edwards III dalam (Widodo, 2010) mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Implementasi kebijakan akan bergantung pada kondisi sumber daya itu sendiri, walaupun aturan-aturan implementasi dilakukan secara cermat, jelas, dan konsisten. Apabila kekurangan sumber-sumber yang diperlukan oleh pelaksana untuk menjalankan kebijakan maka akan menimbulkan masalah dalam proses implementasi. Program BPNT merupakan program yang

bertujuan untuk meminimalisir kemiskinan yang mengurangi beban masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan pangan.

Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non fisik. Sumber daya dalam proses implementasi BPNT sangat penting karena meliputi keahlian staff yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugasnya, wewenang, dan fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan BPNT di Kelurahan Sungai Langkai. Sumber daya bisa berupa sumber daya anggaran, sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas.

Sumber daya anggaran merupakan pilar utama dalam penyaluran BPNT. Besaran bantuan BPNT adalah 110.000/KPM/bulan kemudian naik menjadi 150.000/KPM/bulan kemudian dengan bertambah komoditi bantuan BPNT naik lagi menjadi 200.000/KPM/bulan yang harus dikeluarkan pemerintah. Bantuan tersebut tidak bisa diuangkan. Pemilihan komoditas ini berdasarkan tujuan untuk menjaga kecukupan gizi KPM. Berdasarkan Pedoman Umum Program Sembako 2020 komoditas bahan pangan yang dapat dibeli oleh kpm di agen dan e-warong menggunakan dana bantuan sembako sebagai berikut:

- a. Sumber karbohidrat : beras, sago jagung.
- b. Sumber protein hewani : telur, daging sapi, ayam, ikan segaar.
- c. Sumber vitamin dan mineral : sayur-manyur dan buah-buahan.
- d. Sumber protein nabati : kacang-kacang (termasuk tahu dan tempe).

Selanjutnya sumber daya fasilitas juga berperan penting agar pelaksanaan penyaluran BPNT berjalan dengan lancar. Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya fasilitas yang digunakan untuk penyaluran program BPNT yaitu mesin EDC dan Kartu Combo (KKS dan Kartu ATM). Sedangkan untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendukung untuk jalannya BPNT pemerintah pusat menyediakan ketersediaan agen dan e-warong sesuai sebaran KPM disetiap wilayah dan ketersediaan mesin EDC pada agen dan e-warong.

Sumber daya manusia merupakan subjek dari proses implementasi ini. Pemilihan SDM dalam mensukseskan implementasi program BPNT sangat selektif dan berjenjang. Pelaksana dalam program BPNT dilaksanakan secara berjenjang mulai dari pemerintah pusat hingga daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi program BPNT agar berjalan dengan lancar semua pihak yang terlibat dalam penyaluran BPNT memastikan secara keseluruhan sumberdaya yang meliputi sumberdaya anggaran, sumberdaya fasilitas, dan sumberdaya manusia sudah berjalan dengan baik dan indikator tepat mutu yang diterima oleh KPM sudah sesuai dalam pedoman umum.

3. Disposisi

Dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan sikap dan kerjasama dari pelaksana kebijakan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi program sangat bergantung pada komitmen dan kejujuran pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan. Komitmen yang kuat dapat menjadi modal terlaksananya kebijakan dan mampu memecahkan berbagai masalah implementasi kebijakan.

Komitmen dari pelaksana kebijakan sangat menjadi berpengaruh dalam implementasi program BPNT ini. Karena berjalan tidaknya suatu program bisa dilihat dari kepedulian pelaksana kebijakan terhadap implementasi program BPNT. Kerjasama dan komitmen antara kedua pihak sangat diperlukan dalam implementasi BPNT.

Disposisi dalam implementasi BPNT berkaitan dengan pelaksanaan program BPNT. Pelaksana program ini merupakan tanggung jawab TKSK dan agen/e-warong. Menurut Permensos No 20 Tahun 2019 tentang Bantuan Pangan Non Tunai TKSK bertanggung jawab sebagai pendamping dan memantauan pelaksanaan jalannya program BPNT. Sedangkan agen atau e-warong bertanggungjawab terhadap penyaluran beras sampai kepada KPM

Proses penyaluran BPNT sangat diperlukan pelayanan yang baik dan sikap yang ramah dari pelaksana kepada KPM. Pelaksana bertanggungjawab untuk menampung keluh kesah dan aduan dari KPM untuk di evaluasi serta diproses hingga tuntas.



Gambar 1 alur Pendaftaran DTKS

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sikap ataupun dukungan dari pelaksana, implementasi BPNT sudah di realisasikan dengan baik kepada masyarakat. Dalam proses penyaluran BPNT semua pelaksana ikut serta dalam memantau, membimbing serta mengevaluasi. Namun, dalam hal pengurusan kartu bermasalah karena pengurusan program yang berjenjang mengakibatkan lamanya proses penyelesaian. Secara tidak langsung tujuan program yang 6T tersebut juga ikut terhambat.

4. Birokrasi

Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasa ditetapkan melalui SOP dan mudah dipahami oleh pembuat kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka yang jelas dan sistematis. Implementasi kebijakan bisa jadi belum efektif karena tidak efisiennya struktur birokrasi.

Implementasi program BPNT ini bertujuan mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, administrasi dan memberukan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Adapun SOP Mekanisme pelaksanaan BPNT sebagai berikut :

- Persiapan meliputi koordinasi pelaksanaan, penyiapan data KPM, pembukaan rekening Kolektif, penyiapan e-warong
- Edukasi dan sosialisasi meliputi tujuan edukasi dan sosialisasi, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi, sasaran edukasi dan sosialisasi, materi edukasi dan sosialisasi,.
- Registrasi dan distribusi KKS
- Penggantian KPM

- e. Penyaluran dana bantuan
- f. Pemanfaatan dana bantuan
- g. Program BPNT untuk wilayah khusus

Standar Operasional Prosedur menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam melaksanakan kebijakan program BPNT agar pelaksana kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran program. Struktur birokrasi yang terlalu panjang akan melemahkan pengawas dan menyebabkan proses penyaluran yang rumit. Adapun proses penyaluran implementasi BPNT Kelurahan Sungai Langkai semua pihak ikut serta dalam memantau dan membimbing berjalannya penyalutan BPNT tersebut. Semua pihak menjalankan tugasnya masing-masing berdasarkan peraturan dan saling berkoordinasi terkait proses penyaluran BPNT di kelurahan Sungai Langkai.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa Implementasi BPNT secara aspek struktur birokrasi yang mencakup mekanisme dalam penyaluran serta struktur organisasi pelaksana sendiri, penyaluran BPNT sudah sesuai dengan SOP yang telah dibuat. Dalam implementasinya, terdapat sedikit kendala tanggal yang belum tepat setiap bulan tetapi itu tidak menjadi masalah bagi KPM. Walaupun tanggalnya tidak susai setiap bulan KPM dipastikan mendapatkan bantuan tersebut.

Berikut data penerima dan kartu bermasalah penyaluran BPNT :

No.	Nama Agen	Jumlah KPM	Menerima Manfaat	Kartu Bermasalah
1.	Agen BPNT Cemara	499	422	57
2.	Agen BPNT Nina	460	414	46
jumlah		959	836	103

Program BPNT diukur menggunakan beberapa indikator yaitu sebagai berikut:

- a. Tepat Sasaran , dalam upaya penyaluran program BPNT program BPNT harus dieberikan kepada KPM yang membutuhkan atau sesuai dengan standar pedoman. Di Kelurahan Sungai Langkai sendiri KPM yang menerima bantuan yaitu masyarakat yang penghasilannya kurang dari 25%.
- b. Tepat Jumlah, dalam penyaluran BPNT, diperlukan kesesuaian jumlah bahan pangan dengan jumlah yang telah ditentukan. Di kelurahan Sungai Langkai jumlah bahan yang dibeli KPM kepada agen/e-warong sudah sesuai dengan jumlah uang yang diterima KPM yaitu Rp. 200.000,-/ KPM/ bulan.
- c. Tepat Waktu, dalam penyaluran BPNT harus diberikan sesuai waktu yang ditentukan tetapi di Kelurahan Sungai Langkai tanggal pada saat pengambilan bantuan setiap bulannya masih berubah-ubah sehingga proses penyaluran bansos belum efektif.
- d. Tepat Kualitas, tepat kualitas yang dimaksud indikator ini yaitu bahan pangan yang diterima KPM. Dalam implementasi program BPNT komponen yang diterima KPM sudah sesuai dengan pedoman yaitu sumberdaya hewani,nabati,mineral dan
- e. Tepat Administrasi dalam proses penyaluran BPNT diperlukannya persyaratan data yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun di Kelurahan Sungai Langkai indikator ini masih belum efektif karena masih banyak kartu combo KPM yang terblokir dikarenakan data yang belum efektif
- f. Tepat Harga dalam penyaluran BPNT harga komponen yang diberikan kepada pemerintah harus sesuai dengan harga pasar sehingga tidak merugikan KPM. Di Kelurahan Sungai Langkai harga yang ditawarkan sudah sesuai dengan harga pasar.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam 2020 penelitian mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Implementasi program BPNT di Kelurahan Sungai Langkai Bertujuan Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM belum berjalan optimal. Hal ini dilihat dari keberhasilan Implementasi program menurut Edward III dan indikator kinerja program BPNT yaitu tepat harga, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat administrasi, yang masih belum berjalan sesuai dengan pedoman umum.

Pertama komunikasi merupakan variabel penting dalam implementasi program BPNT. Berdasarkan pedoman umum komunikasi berkaitan dengan sosialisasi dan edukasi. Meskipun sosialisasi sudah berjalan namun tidak efektif akan menghambat penyaluran program BPNT di Kelurahan Sungai Langkai. Kurangnya pengawasan yang dilakukan pada lingkup bawah yaitu tahap yaitu tahap yang paling penting yang lebih mengetahui keadaan KPM tidak mendapatkan pengawasan maksimal. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa RT/RW selaku koordinator di tingkat bawah dalam penyaluran program BPNT.

Kedua, indikator tepat waktu, pendistribusian saldo yang dikelola oleh pusat membuat pelaksana program tidak bisa memastikan waktu penyaluran program BPNT. Ketiga, indikator tepat administrasi data penyaluran program BPNT menggunakan data sensus penduduk terakhir sehingga banyak data yang tidak padan yang membuat banyak terjadinya kartu terblokir yang serta terhambatnya proses implementasi BPNT di Kelurahan Sungai Langkai tersebut

V. Daftar Pustaka

- Hanum, S. (2019). *Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Medan Johor*.
- Hasan, I. (2002). *Analisis data penelitian dengan statistik*.
- Muhajir, N. (1996). *Metode Penelitian Kualitatif (Cet. Reka Sarasin, Yogyakarta)*.
- Muhtar, M. (2018). Pemenuhan Kebutuhan Dasar Keluarga Miskin Melalui Komplementaritas Program Bantuan Sosial (Studi Kasus di Kabupaten Barito Kuala). *Sosio Konsepsia*, 7(3), 119–129.
- Pramesti, R., Muhammad, A. S., & Safitri, D. P. (2019). Impelementasi Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Elektronik Gotong Royong Di Kota Tanjungpinang. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 81–93.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Supriatna, T. (1997). *Birokrasi, pemberdayaan, dan pengentasan kemiskinan*. Humaniora Utama Press.
- Widodo, J. (2010). Analisis kebijakan publik. *Malang: Bayumedia*.
- Tim Pengendalian Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. (2017). *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non-Tunai*. Jakarta.
- Tim Pengendalian Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. (2019). *Pedoman Umum Program Sembako 2020*. Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Peraturan Presiden No 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai.

Peraturan Menteri Sosial No 20 Tahun 2019 tentang Bantuan Pangan Non Tunai